

**PERBANDINGAN KEWENANGAN MEKANISME
IMPEACHMENT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI
INDONESIA DAN *SENATE* DI AMERIKA SERIKAT**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memeperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

AMILIA RIZQI NUR ROSYIDAH

02040421022

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Amilia Rizqi Nur Rosyidah

NIM : 02040421022

Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atas karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 4 April 2023

Saya yang menyatakan



Amilia Rizqi Nur Rosyidah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Perbandingan Kewenangan Mekanisme *Impeachment* Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Senate di Amerika Serikat” yang ditulis oleh Amilia Rizqi Nur Rosyidah ini telah disetujui pada tanggal 4 April 2023.

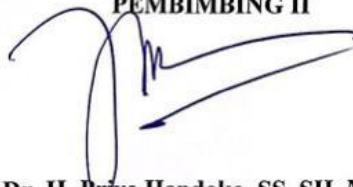
Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

PEMBIMBING II



Dr. H. Rjivo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Perbandingan Kewenangan Mekanisme *Impeachment* Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia Dan *Senate* Di Amerika Serikat" yang ditulis oleh Amilia Rizqi Nur Rosyidah NIM. 02040421022 ini telah diuji dalam Ujian Tesis

Pada tanggal 12 April 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M. Si (Kctua/Penguji)
2. Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. (Penguji I)
4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I (Penguji II)

Surabaya, 25 Mei 2023



Prof. H. Masdar Hilmi, M.Ag. Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amilia Rizqi Nur Rosyidah
 NIM : 02040421022
 Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
 E-mail address : melyrzqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perbandingan Kewenangan Mekanisme *Impeachment* Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia Dan *Senate* Di Amerika Serikat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 April 2023

Penulis

(Amilia Rizqi Nur Rosyidah)

Abstrak

Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan kewenangan mekanisme *impeachment* Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan *Senate* di Amerika Serikat yang akan membahas terkait perbandingan keterlibatan kedua Lembaga negara sebagai Lembaga Perwakilan secara territorial/daerah dalam *impeachment* di negaranya masing-masing yang akan menjawab rumusan masalah bagaimana perbedaan mekanisme *impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat dan bagaimana konstruksi ideal kewenangan DPD dalam *impeachment* jika dibandingkan dengan *Senate* di Amerika Serikat.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa dokumen-dokumen penting yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TAP MPR RI NO.III Tahun 1978, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian akan dikaji secara penafsiran perbandingan untuk menemukan penyelesaian terkait Objek penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *impeachment* di Indonesia melewati proses lebih panjang yaitu dari DPR, kemudian pada MK, kemudian pada MPR dan menunjukkan bahwa DPD di Indonesia tidak memiliki kewenangan di dalamnya, hanya duduk sebagai peserta tribunal sebagai anggota MPR. Berbeda dengan *Senate* yang menjadi juri di tahap akhir *impeachment* di Amerika Serikat dan menjadi penentu akhir pendakwaan tersebut. Sebagai Lembaga Perwakilan kamar kedua antara DPD dan *Senate* memiliki kesenjangan kewenangan. DPR dan *Senate* di Amerika Serikat kewenangannya setara. Sedangkan DPR dan DPD di Indonesia kewenangannya tidak seimbang padahal keduanya merupakan negara demokrasi dan menerapkan sistem *check and balances*.

Kesimpulan dalam penelitian ini Kewenangan DPD di Indonesia perlu dioptimalkan kewenangannya sebagai Lembaga Perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Khususnya dalam *impeachment* ini peran DPD seharusnya menjadi penting untuk masuk dalam proses didalamnya supaya menghindari kepentingan-kepentingan politik dari DPR. Kewenangan DPD perlu dilakukan Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahkan jika memungkinkan perlu dilakukan amandemen UUD 1945.

Kata Kunci: Kewenangan, Impeachment, Lembaga Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah

ABSTRACT

This research is about to compare the power of regional representatives council in Indonesia and united states for impeachment mechanism as the second place representatives in their own country and also to answer what's the different in the Indonesian with united states impeachment mechanism and how the ideal power for the indonesian regional representatives in impeachment mechanism if we compare it with the united states regional representatives power.

In this research, the authors used normative legal research by using a statute approach and comparative approach to find answers of the issue. The author also used several important documents include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the United States Constitution, Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional Representative Council. Regional People's Representative Council, MPR of the Republic Indonesia Rules Number III of 1978, and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which will then be studied in a comparative interpretation to find a solution related to the object of this research.

The results of the study show that the indonesian impeachment process is had a longer process because it through from the DPR, then to the MK, then to the MPR, showing that the DPD in Indonesia has no authority and is not involved, only sits as a participant in the tribunal because of its position as a member of the MPR. In contrast to the Senate which has involvement as a jury in the final stages of impeachment in the United States which can be the final decision of the impeachment. As fellow Representative Institutions, the second chamber shows that there is a gap in authority between the DPD and the Senate. In the United States, both the House of Representative and Senate have equal powers. Meanwhile, in Indonesia, the DPR and DPD have unequal powers even though these two countries are both democracies and claim to implement a system of checks and balances. The DPD in Indonesia needs a power optimize as a Representative Body itself, which is shows the Representative Body that has a legislative function, a supervisory function, and a budget function. Especially in this impeachment, the role of the DPD should be important to be involved in the process in order to avoid the political interests of the DPR. The authority of the DPD needs to be subjected to a judicial review of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, even if possible it is necessary to amend the 1945 Constitution.

Keyword: Power, Impeachment, Representatives, Regional Representatives

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan penelitian.....	13
E. Kegunaan penelitian.....	13
F. Kerangka teoritek.....	14
G. Penelitian terdahulu.....	20
H. Metode penelitian.....	21
I. Sistematika pembahasan.....	23

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum.....	25
B. Teori Demokrasi.....	28
C. Teori Kewenangan.....	41
D. Teori Lembaga Perwakilan.....	47

BAB III MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

A. Mekanisme Impeachment Di Indonesia.....	66
B. Mekanisme Impeachment Di Amerika Serikat.....	84

BAB IV KONTRUKSI IDEAL LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL DI INDONESIA

A. Kewenangan DPD Di Indonesia Dan <i>Senate</i> Di Amerika Serikat Dalam <i>Impeachment</i>	89
B. Kontruksi Ideal Kewenangan DPD Di Indonesia Dalam <i>Impeachment</i> Jika Dibandingkan Dengan <i>Senate</i> Di Amerika Serikat.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M. *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1986
- Arfonsyahdo. *Perbandingan DPD dan Senate di USA*.
- Asshiddiqie, J. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, 2003.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Asshiddiqie, J. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Secretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia, 2006.
- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Budihardjo, M. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1995.
- Dahlan Thaib, J. H. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dani Muhtada, A. D. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes, 2018
- Darmawan. "Kekuatan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden." Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Dekantara, P. "Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia." Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Fatah, E. S. *Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Ganjong. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Gatara, D. I. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Hadjon, D. M. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika, 1993.

- Hidjaz, K. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Huda, N. *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Isra, S. *Pergeseran Fungsi Kekuasaan Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kantaprawira, R. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kusnandi, M. *Ilmu Negara*. Jakarta: Yoga Media Pratama, 2000.
- Lijphart, A. *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Manan, B. *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Moeliono, A. M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1988
- Mulyosudarmo, S. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato, Nawaksara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Palguna, I. D. “Susunan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah”, Dalam *Janedjri M. Gaffar Dkk., Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR-UNDP, 2003.
- Rais, A. *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: Seri Prisma LP3ES, 1986.
- Sapuan. *Impeachment Presiden*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Shadily, J. M. *Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-XXIV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soemantri, S. *Prosedur dan Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Subardjo. *Dewan Perwakilan Daerah*. Graha Ilmu, 2012.

- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Surbakti, R. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Harper Peennial, 2008.
- Syahuri, T. *Lima Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Satu Tahun Pelaksanaannya*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Thaib, D. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Winarno, N. B. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yuliandi, A. *Bikameral Bukan Federal*. Jakarta: Kelompok DPD DI MPR RI, 2006.
- Zoelva, H. *Impeachment Presiden*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

JURNAL/ARTIKEL

- Agus Mulyawan. Analisis Perbandingan Proses Impeachment Amerika Serikat Dan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid. 05, No. 02, (2010).
- Anis Farida, P. H. Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 01, No. 02, (2021), 132.
- Gunawan, W. A. Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan FHUI*, Vol. 38, No. 03, (September 2008), 435.
- Jared. P Cole, T. G. Impeachment and Constitution. *Senate.gov : Congressional Research Service*. (2019).
- Kartasmita, G. Menormalkan Bikameralism Di Indonesia. *Kompas 29 April 2006*, 7.
- M.Hadjon, P. Tentang Wewenang. *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, No. 05 dan 06 tahun XII, (September – Desember, 1997).
- Sakri, M. K. Telaah Konstitusional tentang Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Forum Diskusi Interseksi, "Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II*, (p. 1). Kuningan. (2003).
- Santika, I. G. Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosisal*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2019), 24.

- Satriya, C. A. Karakteristik Pemakzulan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 3, (September 2022), 535.
- Supardan, D. Sejarah Dan Prospek Demokrasi. *Sosio Didaktika: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 126.
- Susanti, B. *Penguatan Kewenangan DPD Dan Pasal-Pasal Lain Yang Terkait Di Bidang Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan*. Makalah Disampaikan Dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara: Diselenggarakan Di Universitas 45 Makassar, (2007).
- Syafrudin, A. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000), 22.
- Thaib, D. Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.23, (2003), 87.
- Widayati. "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum Jurnal*, Vol. 44, No. 4 (2015), 416.
- Yasin, B. Kedudukan Dan Fungsi DPD Dalam Sistem Parlemen Bikameral Indonesia. *Jurnal Independent*, Vol. 08, No. 02, (2020), 351.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TAP MPR RI NO.III Tahun 1978

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Original Text of United States Constitution

Website Online

https://id.wikisource.org/wiki/Mekanisme_Impeachment_%26_Hukum_Acara_Mahkamah_Konstitusi/Lampiran/Lampiran/FLOW_CHART_PROSES_IMPEACHMENT_DI_INDONESIA#/media/Berkas:IMPEACHMENT_MPR, diakses pada 29 maret 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49851538> diakses pada 29 maret 2023.